

**BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) DARI MONOPOLI HINGGA
MEKANISME PASAR TAHUN 1998 – 2006**

Oleh:
Degia Fitra Anggraeni, Suwitra, Farida Sarimaya¹

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil riset terdahulu penulis yang berjudul “Kondisi Pangan Nasional Pasca Krisis Moneter (1998 – 2006): Alih Fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) dari Monopoli Hingga Mekanisme Pasar”. Kedaulatan pangan seharusnya dimiliki oleh setiap negara, begitu pula dengan Indonesia yang dikenal dengan sebutan negara agraris. Di masa pemerintahan Soeharto Indonesia sempat memiliki kedaulatan pangan yang kuat, karena beberapa kali sempat mencapai swasembada pangan pada tahun 1980-an. Setelah Indonesia terkena Krisis Moneter dan El Nino ditahun 1997, kedaulatan pangan Indonesia kembali melemah. Selain keadaan pangan yang melemah, kisis keuangan yang menerpa saat itu pun menjadikan Indonesia begitu terpuruk hingga nasib rakyat kian memburuk, dengan kemiskinan yang merajalela. Keadaan seperti ini membuat pemerintah akhirnya mengambil keputusan untuk pemulihan dengan cara meminjam dana pada IMF yang kemudian membuahkan LoI (Letter of Intens) sebagai persyaratannya. Poin-poin yang berada dalam LoI sebagai rekomendasi dari IMF untuk memulihkan kondisi Indonesia harus dilakukan oleh Indonesia. Di Indonesia pangan diatur oleh sebuah lembaga pemerintah, yaitu Badan Urusan Logistik (Bulog). Namun masuk dalam masa reformasi peran dan hak Bulog berubah hanya sebatas mengontrol komoditi beras saja, karena rekomendasi dari IMF yang tertuang dalam LoI.

Kata kunci: *Orde Baru, Reformasi, IMF, Bulog, dan Ketahanan Pangan*

ABSTRACT

This research is a result of the author's previous research, entitled “Kondisi Pangan Nasional Pasca Krisis Moneter (1998 – 2006): Alih Fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) Dari Monopoli Hingga Mekanisme Pasar”. The food autonomy should be possessed by every country, especially Indonesia which is known as agricultural country. During the reign of Soeharto, Indonesia ever had a great food autonomy since Indonesia reached food self-sufficiency for several times in 1980s. After the monetary crisis and El Nino in 1997, the food autonomy in Indonesia fell off. Besides the poor condition of food, the monetary crisis which happened at that time aggravated the situation in Indonesia that caused the people in Indonesia deteriorated by the increasing of poverty. This situation triggered the government to make a recovery decision by borrowing money from IMF which then led to LoI (Letter of Intense) as the requirement. The points of

¹ Penulis merupakan Mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI dengan Drs. Suwitra M.Hum sebagai dosen pembimbing I dan Farida Sarimaya S.Pd, M.Si sebagai dosen pembimbing II. Penulis dapat dihubungi melalui nomor 0896-1175-9511 atau email: degiafitra@gmail.com

LoI, which was recommended by IMF as the solution for recovering the situation in Indonesia, had to be implemented. In Indonesia, food is regulated by a government institution, namely The Bureau of Logistics or Bulog. However, during the Reformation era the roles and rights of Bulog are different that Bulog only manages the commodity of rice, yet Bulog does not control the food market price.

Keywords: *New Order Era, Reformation Era, IMF, Bulog, and Food Security*

PENDAHULUAN

Setiap negara tentu saja membutuhkan pangan untuk kehidupan rakyatnya. Pangan adalah kebutuhan primer yang paling sensitif diseluruh dunia. Setiap negara harus mengatur cadangan pangannya dengan baik, tentu saja untuk mengatur cadangan pangan dengan baik perlu peran pemerintah. Di Indonesia pangan diatur secara politik oleh Pemerintah Orde Baru melalui sebuah lembaga logistik nasional, yaitu BULOG atau Badan Urusan Logistik.

BULOG adalah salah satu badan yang dipercaya pemerintah untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan pangan nasional. Menurut Nuraini (2013), bahwa Badan Urusan Logistik (BULOG) didirikan pada tahun 1967. BULOG mendapatkan banyak sekali peran dalam posisinya sebagai wakil pemerintah pada pengaturan

kebijakan pangan nasional. Sementara menurut Sumarkoco dan Bambang (1982), tugas BULOG di masa pemerintahan Orde Baru di antaranya:

“Tugas pokok BULOG adalah mengendalikan harga bahan-bahan pokok guna menjaga kestabilan harga bagi produsen maupun konsumen, sesuai kebijakan umum pemerintah. BULOG memonitor sembilan bahan pokok sejak tahun 1969/1970. Termasuk dalam sembilan bahan pokok adalah beras, gula, ikan asin, tekstil kasar, batik, sabun cuci, minyak goreng, minyak tanah dan garam. Sejak tahun 1971 BULOG ialah distributor dan importir tunggal untuk gula dan terigu. Tahun 1974 BULOG kembali mendapat tugas mengkoordinasikan penyediaan ternak, 1977 kembali ditambahkan tugasnya sebagai Importir kedele dan tugasnya terus bertambah sebagai pengelola jagung, kacang tanah dan kacang hijau. Untuk melaksanakan fungsinya BULOG membentuk Dolog-dolog (Depot Logistik) di setiap provinsi, sub-Dolog di beberapakabupaten serta gudang Dolog/sub-Dolog yang letaknya tersebar di seluruh Indonesia”

(Sudiro & Bambang, 1982, hlm. 533).

Pada tahun 1997 Asia mengalami krisis ekonomi global yang dimulai di Thailand dan berlanjut menghantam perekonomian Indonesia. Pemerintah Orde Baru menyadari krisis moneter yang tengah dialaminya akan menyebabkan perekonomian terganggu. Kesadaran pemerintah akan Krisis yang menyerang Indonesia diperlihatkan dengan meminta bantuan kepada IMF. “Indonesia harus tunduk pada sejumlah persyaratan yang dibuat IMF yang kemudian dijabarkan dalam *Letter of Intent* (LoI), termasuk kebijakan pangan. Pada waktu itu rencana pembangunan Indonesia hanya mengacu ke LoI, bukan kepada rencana yang telah dibuat pemerintah” (Supardi, 2009).

Berdasarkan beberapa butir persyaratan yang telah diajukan IMF dapat di disimpulkan menjadi tiga cara jitu untuk mengatasi masalah krisis moneter, yaitu: (1) Liberalisasi perdagangan, (2) Privatisasi BUMN, dan (3) Kebebasan investasi modal asing. Peran BULOG yang sangat besar dalam masa kepemimpinan pemerintah Orde Baru, kini pada rezim pasar bebas peran BULOG

benar-benar mati dalam lautan perdagangan bebas, peran monopoli BULOG kini berakhir dengan hanya terbatas pada monopoli beras.

Perubahan besar-besaran terjadi setelah penandatanganan perjanjian peminjaman dana pada IMF terutama dalam hal pangan yang akan dibahas kali ini. Peran BULOG yang pada masa Orde Baru memiliki peran besar dalam memonopoli dan menjadi pengimpor tunggal beberapa komoditi pangan bahkan hingga monopoli sembilan bahan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat. Akhirnya BULOG menjadi perusahaan umum yang terbatas hanya memonopoli komoditi beras. Bahkan monopoli dihapuskan dan berubah mengikuti mekanisme pasar.

Tahun 1998 – 2006 adalah jangka waktu yang dipilih, karena 1998 adalah puncak dari krisis yang terjadi di Indonesia dan juga awal Indonesia menandatangani perjanjian peminjaman dengan IMF guna menanggulangi masalah Krisis Moneter 1997-1998. Sementara tahun 2006 diambil sebagai akhir dari pembahasan karena ditahun 2006 pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono berhasil melunasi utang

kepada IMF. Tahun 2006 adalah cikal bakal perubahan kebijakan pangan nasional.

Tulisan ini didukung oleh beberapa buku sebagai landasan berpikir penulis dalam melakukan penulisan terkait peran BULOG dan keadaan pangan Indonesia. Buku-buku tersebut antara lain: buku Bustanu Arifin, buku Zacky Nouval. Dkk, dan Mahmud Thoha. Ada pula sebuah tesis dari Tania Vinita yang sangat membantu penulisan ini. Sumber-sumber tersebut ialah yang banyak dipakai oleh penulis sebagai sumber untuk menyelesaikan tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode historis. Metode historis digunakan karena peristiwa yang diteliti sudah lama terlewat dan keterbatasan mencari narasumber. Metode historis dipilih sebagai metodologi penulisan karena penulisan ini merupakan kajian sejarah yang data-datanya diperoleh dari jejak-jejak yang ditinggalkan dari suatu peristiwa di masa lampau. Metode historis menurut Gottschalk (1986, hlm. 32) adalah proses menguji dan menganalisis secara

kritis rekaman dan peninggalan dan menuliskannya berdasarkan fakta yang diperoleh. Serupa dengan Gottschalk, Daliman juga mengatakan bahwa metode penulisan diartikan sebagai metode penulisan dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah (Daliman, 2012, hal. 27).

Penulisan sejarah tentang Alih Fungsi BULOG didahului oleh tahap pemilihan topik, penyusunan rencana penelitian, bimbingan dan konsultasi. Setelah tahapan-tahapan itu dilalui, maka dilakukanlah proses penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan melalui empat tahap penelitian. Tahap pertama tahap Heuristik atau pencarian sumber, pada tahap ini, penulis berusaha mencari beberapa buku sumber untuk mendukung penelitiannya. Usaha yang dilakukan untuk mendapatkan buku sumber tentu saja mendatangi beberapa perpustakaan yang ada di Bandung dan mengumpulkan beberapa koleksi pribadi penulis.

Tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah tahap kritik, pada tahap ini terdiri dari dua kritik, yaitu

kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal lebih melihat dari kondisi sumber yang didapat. Sementara kritik internal adalah kritik pada konten dari sumber yang didapat. Kritik yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut, kritik Eksternal penulis memilah sumber dalam penulisan ini bahwa sumber ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dan ahli dalam menggambarkan perekonomian Indonesia dan sebagiannya merupakan pelaku dalam sejarah yang sedang penulis tulis ini. beberapa ekonom dan sejarawan cukup objektif dalam menilai keputusan – keputusan pemerintah, diantaranya Bustanul Arifin, Rita Hanafie, Kwik Kian Gie, dan Tulus T.H Tambunan.

Selanjutnya kritik internal Contoh kritik yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melihat perbandingan dari buku-buku yang penulis gunakan sebagai sumber dalam penulisan ini. Perbandingan tersebut penulis lakukan terhadap buku yang ditulis oleh Bustanul Arifin yang berjudul *Sepktrum Kebijakan Pertanian Indonesia* dengan buku yang ditulis oleh Zacky Nouval Dkk, yang berjudul *Petaka*

Politik Pangan di Indonesia. Dalam bukunya Bustanul Arifin banyak menjelaskan tentang keadaan pertanian Indonesia di saat krisis moneter dan masa setelah krisis moneter, Bustanul juga menjelaskan tentang peran BULOG dan keadaan pasar impor disektor pertanian. Sementara buku yang ditulis Zacky Nouval dkk membahas tentang peran pemerintah dalam mengamankan pangan, keadaan pasar setelah terjadinya krisis moneter.

Tahap selanjutnya setelah penulis melakukan kritik eksternal dan kritik internal terhadap sumber yang telah dikumpulkan, penulis melakukan tahap interpretasi atau penafsiran terhadap sumber. Tahap penafsiran dari data-data yang telah melalui tahap kritik menjadi fakta-fakta yang diperoleh dalam penelitian. Setelah data-data tersebut dirumuskan dan disimpulkan kemudian ditafsirkan. Setiap fakta yang ditemukan dihubungkan dengan fakta lain, sehingga menjadi sebuah rekonstruksi yang memuat sebuah penjelasan berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang didapatkan.

Tahap terakhir atau tahap keempat dalam penelitian sejarah

adalah historiografi. Historiografi merupakan kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan tahap interpretasi, keduanya dilakukan secara bersamaan. Pada bagian ini penulis akan menyajikan hasil temuan-temuan dari berbagai sumber yang penulis dapatkan ketika proses penelitian, hasil temuan tersebut kemudian dianalisis dan diseleksi kemudian direkonstruksi menjadi sebuah penulisan sejarah. Dalam kebebasannya peneliti harus memperhatikan ketentuan-ketentuan umum baik dalam penulisan maupun dalam penafsirannya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah penafsiran (Interpretasi), penjelasan (Eksplanasi) dan penyajian (*Ekspose, Darstellung*) (Ismaun, 2005, hlm: 157).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bulog adalah sebuah lembaga pengatur pangan yang sangat dipercayai oleh pemerintah orde baru. Lembaga pengatur pangan sudah ada di masa penjajahan Belanda dengan nama VMF (*Voeding Midlen Founds*). VMF bertugas untuk membeli, menjual dan mengadakan

persediaan bahan makanan. Dimasa pendudukan Jepang VMF berubah nama dan berganti dengan *Sangyobu-Nanyp Kohatsu Kaisa* karena pemerintahan Jepang pada masa itu mengganti seluruh hal dan aspek yang berbau Eropa yang ada di Indonesia.

Sementara di masa Orde Lama lembaga pengatur pangan ini bernama Yayasan Bahan Makanan (BAMA), lalu diganti kembali menjadi yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Fungsi dari lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah dari masa ke masa ini sama, sebagai lembaga pengatur pangan atau lembaga yang bergerak dalam bidang pangan nasional. Di masa awal Orde Baru pemerintah tak ingin kalah dengan pemerintahan sebelumnya, orde baru memiliki Kolognas (Komando Logistik Nasional) sebagai lembaga pengatur pangan, sebelum nantinya pemerintah melakukan perombakan terhadap lembaga Kolognas dan mentransformasikannya ke dalam organisasi baru yang dinamakan Badan Urusan Logistik (BULOG).

Badan Urusan Logistik (BULOG) dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor

114/Kep/1967 dengan tugas pokok untuk mengamankan persediaan pangan dalam rangka menegakan eksistensi pemerintah yang baru. Eksistensi BULOG sebagai lembaga monopoli perdagangan pangan Indonesia diperkuat dengan Keppres RI Nomor 272/1967, dimana BULOG dinyatakan sebagai *Single Purchasing Agency* dan Bank Indonesia ditunjuk sebagai *Single Financing Agency* dalam Inpres No. 1/1968 (Hidayat, 2008, hlm. 26).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, status hukum BULOG di sahkan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) berdasarkan Keppres RI no.39 tahun 1978. BULOG menjadi sebuah lembaga yang sah yang sudah diatur oleh Keppres. Setelah sah status hukumnya kegiatan yang dilakukan BULOG semakin lugas tanpa halangan apapun. Menurut Sumarkoco Sudiro dan Bambang (1982), untuk menjalankan fungsinya BULOG membentuk Dolog-dolog (depot logistik di setiap provinsi, sub-Dolog dibeberapa keresidenan/kabupaten serta gudang Dolog/subDolog yang letaknya tersebar diseluruh Indonesia).

Sampailah perjalanan BULOG ditahun 1997, pada tahun itu Indonesia mengalami begitu banyak peristiwa. Dimulai dengan kekeringan yang disebabkan oleh el-nino, serta krisis moneter yang menyerang perbankan Indonesia dan membawa Indonesia masuk kedalam kondisi yang begitu rumit. Peristiwa krisis ini, membuat Indonesia jatuh tersungkur tak berdaya dalam perekonomian yang melemah. Di tengah gempuran permasalahan ekonomi, sosial dan politik Indonesia terus berusaha untuk bertahan dengan kondisinya yang terpuruk. Kondisi yang sudah semakin berbahaya bagi kedaulatan Indonesia ini adalah salah satu alasan Indonesia menghampiri sang malaikat penyelamat kala itu IMF.

IMF (*International Monetary Fund*) ialah lembaga Internasional yang memfokuskan diri dalam urusan Moneter Internasional. Lembaga IMF menurut Mahmud Thoha (2003), adalah bank sentral dunia, atau bank sentralnya bank-bank sentral negara-negara anggota di seluruh dunia. IMF sebagai bank sentral dunia memiliki kesamaan fungsi dengan bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia. Kalau salah satu tugas

utama Bank Indonesia adalah mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, maka salah satu fungsi utama IMF adalah membantu memelihara stabilitas kurs devisa negara-negara anggotanya. IMF adalah organisasi multilateral yang nafasnya amat ditentukan oleh besarnya kontribusi finansial negara-negara anggota.

Peminjaman dana pada IMF tidak semata-mata diberikan begitu saja, namun Indonesia harus melakukan sebuah kesepakatan tertulis dengan IMF. Kesepakatan tertulis ini dikenal dengan LoI, dimana dalam LoI ini dibahas bagaimana kedudukan IMF atas Indonesia dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan Indonesia atas prakarsa dan persetujuan IMF nantinya. Inilah awal dari campur tangan IMF dalam kebijakan Pemerintah Indonesia. Walaupun dirasakan sebagai suatu tamparan terhadap gengsi nasional, namun mau tak mau akhirnya pemerintah memutuskan untuk meminta dana bantuan terhadap IMF.

Nota perjanjian Indonesia dengan IMF atau LoI pertama ditandatangani di akhir tahun 1997.

Butir-butir LoI pertama dalam Fadli Zon (2006), mencakup pada sasaran anggaran berimbang, sasaran-sasaran pengadaan uang dan inflasi, kebijakan nilai tukar uang, keseimbangan perdagangan dan kebijakan perdagangan, reformasi hukum perburuhan, reformasi struktur PNS, privatisasi, dan perubahan perundang-undangan.

Rekomendasi IMF yang pertama dalam hal pangan ialah dengan melakukan liberalisasi pangan mulai dilakukan ditahun 1998, dengan membuka kran impor sebebaskan-bebasnya. Bahkan tarif impor pada masa itu di hapus hingga mencapai 0% melalui SK Memperindag No.439 tentang bea masuk tanggal 22 September 1998, untuk mendorong importir mengimpor pangan ke Indonesia demi mencukupi ketersediaan pangan kala itu. Tarif impor yang ditiadakan atau ditekan hingga 0% masih bertahan hingga tahun berikutnya.

Ditahun 1997 monopoli pangan BULOG dikebiri karena adanya persyaratan dari IMF yang tertulis dalam LoI. BULOG hanya boleh memonopoli beras dan gula saja. Dalam perjanjian selanjutnya

yaitu penandatanganan LoI kedua tanggal 15 Januari 1998, kembali BULOG kehilangan haknya. Pada perjanjian ini, BULOG hanya diperbolehkan mengatur beras. Beras menjadi satu-satunya hal yang dapat dikelola oleh BULOG. Ini pulalah yang menjadikan mindset rakyat Indonesia terhadap BULOG sebagai lembaga yang mengatur beras.

Dalam mendapatkan dana pinjaman dari IMF, Indonesia harus mematuhi syarat yang diajukan oleh IMF. Syarat yang harus dipatuhi oleh Indonesia berupa point-point yang telah tertulis dalam LoI. Berikut syarat yang harus dipatuhi Indonesia dalam melaksanakan Liberalisme pertanian dari IMF, menurut Fatih Gama Abisono (2002):

1. Restrukturisasi peran BULOG dalam tata niaga pangan. Peran BULOG sebagai pemain utama dalam tata niaga pangan dipangkas habis, kecuali untuk komoditi beras.
2. Desakan untuk segera menjalankan kesepakatan dengan WTO, terutama untuk mengurangi *Idomestic support* di sektor pertanian. Dalam hal ini pemerintah telah

menetapkan subsidi kredit tani hanya diberikan sampai tahun 2004 dan pengurangan secara bertahap untuk subsidi pupuk.

3. Pengurangan tarif impor. Hal ini berakibat produk pertanian impor membanjiri pasar nasional dan menjadikan produksi lokal yang dikerjakan oleh skala usaha tani tradisional kalah bersaing.
4. Meskipun konsumen diuntungkan dengan kebijakan impor pangan, kelompok ini sangat rentan terhadap politik dagang di bawah mekanisme pasar. Sering sekali konsumen mendapatkan harga yang fluktuatif dan tidak menentu.

Hak BULOG kembali diambil melalui UU No. 23 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999, BULOG kehilangan fasilitas pemberian KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) yang sudah sejak lama diperuntukan untuk BULOG dalam menjalankan tugasnya, membeli hasil pangan petani yang kelebihan produksi untuk menjaga dan menyeimbangkan stok beras. Kini BULOG dihadapkan dengan pemenuhan anggaran dengan menggunakan kredit bank swasta

yang lebih mahal dari KLBI yang biasa digunakan BULOG bertahun-tahun.

Ditahun 2000 tugas BULOG diperbaharui, melalui Keppres Nomor 29/2000 tanggal 26 Februari 2000 yaitu tentang melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras (mempertahankan harga pembelian pemerintah/HPP) dan usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vinita, 2012, hlm.75). tidak lama setelah Keppres ini di sahkan, tugas BULOG kembali berubah.

tanggal 23 November 2000 pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 23 November 2000 tentang tugas BULOG, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Ditahun 2001 kembali pemerintah mengeluarkan keppres tentang tugas BULOG, yaitu Keppres No. 103/2001 tanggal 13 September 2001 yang mengatur kembali tugas fungsi BULOG. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa

tugas BULOG adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kedudukan sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun Keppres ini juga sekaligus menekan bahwa BULOG harus beralih status menjadi BUMN selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2003 (Vinita, 2012, hlm. 75-76).

Tugas BULOG sendiri pun tidak jelas, karena seringkali pemerintah menggantinya dalam Keppres. Pada intinya tujuan pemerintah ialah menggantikan status BULOG dari LPND menjadi Perum (perusahaan umum). Sebenarnya BULOG sendiri mengalami distorsi, karena kepercayaan masyarakat yang menurun. Kepercayaan masyarakat dan juga sikap *protect* dari IMF ini, berawal dari BULOG yang memiliki hak monopoli serta beberapa petinggi BULOG yang memiliki kasus korupsi. Bukan hal yang aneh BULOG disebut-sebut sebagai sebuah lembaga yang “basah”, karena hal yang diatur BULOG ialah pangan

yaitu komoditi yang begitu luas karena banyak menyangkut hak hidup rakyat.

Di awal tahun 2003 merupakan babak baru bagi BULOG, awal tahun ini tepatnya di tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG secara resmi berubah menjadi Perum BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003 yang kemudian di revisi menjadi PP RI Nomor 61 Tahun 2003. Berubahnya status BULOG dari LPND menjadi Perum berarti bahwa BULOG disamping memiliki fungsi publik juga memiliki fungsi komersial yang bersifat laba berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. BULOG seperti mengalami konflik kepentingan antara misi sosial dan bisnis menjadikan BULOG sebagai missing institution. BULOG sebagai lembaga yang dikuatkan UU sebagai lembaga bisnis tentu lebih berorientasi pada mencari laba.

Dalam masalah pangan SBY selalu konsen dengan kebijakan Revitalisasi Pertanian. Bila pemerintah-pemerintah sebelumnya selalu memilih kebijakan pangan yang berorientasi pada swasembada pangan, beda dengan SBY yang ingin

sekali memperbaiki pertanian. Revitalisasi pertanian diartikan sebagai kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, melalui peningkatan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain (Vinita, 2012, hlm. 82). Perbaikan pertanian justru akan membuat produksi lebih baik dan pemenuhan pangan menjadi lebih stabil. Bagi BULOG pergantian kepemimpinan bukan hal yang luar biasa, karena tidak ada pengaruh sama sekali bagi BULOG.

Bila dimasa Orde Baru BULOG dikenal sebagai salah satu lembaga yang mengelola kecukupan beras untuk keluarga ABRI dan Pegawai Negeri Sipil. Ditahun 2004 BULOG mendapat tugas untuk mengurus kecukupan beras untuk rakyat miskin (Raskin), walaupun masa-masa sebelumnya BULOG juga sudah berkali-kali mengelola beras untuk rakyat miskin. Pesediaan dan pelaksanaa penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin (Raskin) untuk mendapat beras dimana pengadaan beras tersebut

diutamakan dengan menyerap beras produksi dalam negeri.

Raskin adalah program perlindungan sosial (social protection program) yang ditujukan buat rumah tangga miskin (targeted food subsidy), umumnya mereka beresiko tinggi terhadap food insecurity. Raskin membuka akses secara ekonomi terhadap pangan, sehingga dapat melindungi rumah tangga rawan pangan dari malnutrition terutama energi dan protein. Hal ini menjadi penting buat negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi persoalan masih dominannya masyarakat yang kekurangan energi dan protein, sehingga telah berakibat buruk terhadap kecerdasan anak-anak, serta rendahnya produktivitas SDM dan kematian akibat penyakit infeksi karena lemahnya daya tahan tubuh (Abubakar, 2008).

Presiden SBY berhasil melunasi utang Indonesia pada IMF ditahun 2006, walaupun utang tersebut jatuh tempo pada tahun 2010. Meski Indonesia tidak lagi memiliki utang pada IMF namun keadaan BULOG tidak terjadi perubahan apapun ditahun 2006 ini. Namun

tahun 2006 merupaka tonggak pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi BULOG dalam hal mengelola beras dan kembali mengatur harga pangan beras. BULOG kembali menjadi perantara antara petani dengan pemerintah.

Di tahun mendatang pemerintah akan memberikan hak BULOG yang semakin luas. Terlihat ditahun 2012 nanti BULOG akan mendapatkan kembali haknya dalam mengontrol dan memonopoli pangan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan menugaskan kembali Perum Bulog sebagai stabilisator harga 5 komoditas kebutuhan pokok. Hal ini agar tidak terulang kejadian kenaikan harga kedelai hingga melonjak 100% (Bulog.co.id, 2012)

SIMPULAN

Badan Urusan Logistik (BULOG) merupakan sebuah lembaga yang mengurus segala hal tentang pangan, BULOG begitu sangat penting dimasa Orde Baru. Setelah Indonesia di guncang krisis yang hebat akhirnya hak dan peran BULOG sedikit demi sedikit termakan oleh LoI (Letter of Intens)

sebuah syarat IMF atas peminjaman dana yang dilakukan Indonesia.

Krisis Moneter yang semakin meluas mengantar Indonesia untuk meminjam dana pada IMF sebagai jalan keluar dari keadaan yang berlangsung. Di akhir tahun 1997 akhirnya Indonesia resmi meminjam dana pada IMF dengan di barengi oleh sebuah perjanjian bernama LoI (Letter of Intent) yang mau tak mau harus dipatuhi pemerintah. Perjanjian ini terlihat sebagai runtuhnya kedaulatan pemerintahan Indonesia, kerana setiap kebijakan pemerintah harus mendapat persetujuan IMF dan kebijakan yang IMF rekomendasikan untuk Indonesia harus dipatuhi.

IMF masih tetap mempengaruhi kebijakan Indonesia, meskipun Indonesia telah berganti pemerintahan. Salah satu hal yang menjadi rekomendasi dalam LoI yang harus dipatuhi pemerintah ialah menghilangkan hak monopoli dari BULOG dengan kata lain harga pangan seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar, membuka impor dengan tarif masuk 0%. BULOG sebuah lembaga yang mengatur segala hal tentang pangan nasional dikebiri haknya, hanya sebatas dapat

mengatur atau memonopoli komoditas beras saja. Hak-hak istimewa BULOG yang telah diberikan sejak masa Orde Baru menjadi ditiadakan salah satunya KLBI (Kredit Likudasi Bank Indonesia) yang selama ini menjadi sumber dana BULOG untuk menjalankan tugasnya menyerap seluruh hasil produksi petani.

Di awal tahun 2003 merupakan babak baru bagi BULOG, awal tahun ini tepatnya di tanggal 20 Januari 2003 LPND BULOG secara resmi berubah menjadi Perum BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2003 yang kemudian di revisi menjadi PP RI Nomor 61 Tahun 2003. Berubahnya status BULOG dari LPND menjadi Perum berarti bahwa BULOG disamping memiliki fungsi publik juga memiliki fungsi komersial yang bersifat laba berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Presiden SBY berhasil melunasi utang Indonesia pada IMF ditahun 2006, walaupun utang tersebut jatuh tempo pada tahun 2010. Meski Indonesia tidak lagi memiliki utang pada IMF namun keadaan BULOG tidak terjadi perubahan apapun ditahun 2006. Namun tahun

2006 merupakan tonggak awal pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi BULOG dalam hal mengelola beras dan kembali mengatur harga pangan beras. BULOG kembali menjadi perantara antara petani dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2012). *Sby putusan Bulog kuasai 5 komoditas pangan*. [Online] Tersedia: <http://Bulog.co.id/berita/37/3569/10/8/2012/SBY-Putusan-Bulog-Kuasai-5-Komoditas-Pangan.html>. [25 November 2015]
- Abubakar, Mustafa. (2008). *Kebijakan pangan, peran perum Bulog, dan kesejahteraan petani (transkripsi orasi ilmiah direktur utama perum Bulog)*. [Online] Tersedia: http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1662. [25 November 20015]
- Daliman, A. (2012). *Metode penulisan sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Gama Abisono, Fatih. (2002). Dinamika kebijakan pangan orde baru: otonomi negara vs. Pasar global. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, V, (3). Hlm 271 – 294.
- Gottschalk, Louis F. (1986). *Mengerti sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hidayat, Syaridusin, Dkk. (2008). *Manajemen ketahanan pangan di daerah*. Bandung: PKP2A I – LAN.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press
- Nuraini. (2013). Meningkatkan ketahanan pangan dalam masyarakat (studi: sinergi kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengadaan beras di kab. Banyumas). *Sawala jurnal administrasi negara*, II, (2). Hlm 11-18.
- Sudiro, Sumarkoco & Bambang. (1982). BULOG, Peranan dan Tanggung Jawabnya. Dalam Sudiro, e.d & Toruan (Penyunting). *Mencari bentuk ekonomi indonesia perkembangan pemikiran 1965 – 1981* (hlm. 529 – 537). Jakarta: PT. Gramedia.
- Supardi. (2009). Dampak impor kedelai berkelanjutan terhadap ketahanan pangan. *Analisis kebijakan pertanian*, VII, (1), hlm. 87-102.
- Thoha, Mahmud. (2003). Pasang surut perekonomian. Dalam Hisyam, Muhammad (Penyunting). *Krisis masa kini dan orde baru* (hlm. 236 - 294). Jakarta: Obor.
- Vinita, Tania. (2012). Implikasi letter of intent dalam kebijakan impor beras indonesia 2004-2010. (Tesis). Pascasarjana, Universitas Indonesia, Depok (tidak diterbitkan).

FACTUM
Volume 5, Nomor 1, April 2016

Zon, Fadli. *Politik huru-hara mei* of Policy Studies (IPS).
1998. 2006. Jakarta: Institute